

Lampiran : Peraturan Bupati Mamasa

Nomor : 41 Tahun 2019

Tanggal : 31 Desember 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2018-2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		Sumber Data
			Dasar	Formulasi/Rumus Perhitungan	
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Meningkat	%	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	$\frac{(PDB_t - PDB_{t-1})}{PDB_{t-1}} \times 100\%$	BPS

2.	PDRB Per Kapita Meningkat	%	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	$\frac{\text{PDRB}}{\text{Penduduk Pertengahan Tahun}}$	BPS
3.	Angka Kemiskinan Menurun	%	Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	$\frac{\text{Banyaknya Penduduk Miskin}}{\text{Total Jumlah Penduduk}} \times 100 \%$	BPS
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamasa Tahun 2018-2023	$\text{IPM} = \sqrt[3]{\frac{\text{kesehatan} \times \text{I pendidikan} \times \text{I pengeluaran}}{\text{X 100}}}$	BPS
5.	Koefisien Elastisitas Kesempatan Kerja (EKK) Meningkat	%	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	$= \frac{\text{Laju Pertumbuhan Kesempatan Kerja (t)}}{\text{PE(t)}}$ Ket : TK = Tenaga Kerja PE = Pertumbuhan Ekonomi t = Tahun Berjalan t-1 = Tahun sebelumnya	BPS

6.	Laju Pertumbuhan Kesempatan Kerja Meningkat	%	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja	$= \frac{\text{Jumlah TKt} - \text{Jumlah TK t-1}}{\text{Jumlah TKt-1}} \times 100$	BPS
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurun	%	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	$\text{TPT} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100 \%$	BPS
8.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Meningkat	Nilai	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	PP = % angka kecukupan gizi (AKG) x Bobot masing-masing kelompok Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
9.	Indeks Reformasi Birokrasi BB	Nilai	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kemenpan RB
10.	Capaian Predikat SAKIP B	Nilai	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kemenpan RB dan BPKP
11.	Persentase Penerapan Inovasi Daerah	%	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi}}{\text{Jumlah Total Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Bappelitbang
12.	Persentase Jaringan Transportasi Jalan dalam Kondisi Mantap	%	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan	$= \frac{\text{Panjang Jalan Kab. dalam Kondisi Mantap}}{\text{Panjang Seluruh Jalan Kab. didaerah tersebut}} \times 100 \%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

			Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.		
--	--	--	--	--	--

BUPATI MAMASA,

ttd.

H. RAMLAN BADAWI